BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh penulis di Kementerian Pertanian RI pada Bagian Umum, Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian RI. Dapat dikatakan hal-hal yang dikerjakan oleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Kehumasan.

Kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 bagian yaitu kegiatan rutin dan insidentil. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari atau sering dikerjakan, seperti kliping, analisis berita tentang pertanian, rapat program kegiatan (*event*). Sedangkan kegiatan insidentil, merupakan kegiatan yang dilakukan sesekali saja. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI khususnya Bagian Umum, Sub Bagian Hukum dan Humas, memiliki kegiatan insidentil yang masing-masingnya memiliki tujuan yang berbeda, ada yang bertujuan untuk memperkenalkan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian itu sendiri di kalangan masyarakat luas (kegiatan *event* pameran) dan ada pula yang bertujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

2.1 Aktivitas Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan	
			Rutin	Insidentil
1	Kamis, 30 Juli 2015	• *Packing* materi dan mempersiapkan Kunjungan Pers (Kunpers) di Yogyakarta dan Solo • Membuat dan cetak sertifikat untuk acara Kunjungan Pers di Yogyakarta dan Solo		√ √
2	Jumat, 31 Juli 2015	• Menjadi *info guide* pada pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) di JCC Hall B		√

3	Senin, 03 Agustus 2015	• Pembukaan Kunpers • Mengunjungi Kelompok Ternak Ngudi Makmur, desa Wonorejo, Kab. Sleman, DIY. • Penyampaian materi Kadis Pertanian Pemprov DIY • Penyampaian materi dari biro umum dan humas kepada wartawan		√ √
4	Selasa, 04 Agustus 2015	• Perjalanan menuju lokasi percontohan pertanian modern UPJA Desa Bagyo Mulyo Desa Dalangan Kabupaten Sukoharjo • Kunjungan bersama Ditjen PSP di lokasi percontohan pertanian		√ √

		modern UPJA Desa Bagyo		
5	Rabu, 05 Agustus 2015	• Penutupan Kunpers		√
6	Kamis, 06 Agustus 2015	• Perjalanan pulang Yogyakarta-Jakarta		
7	Jumat, 07 Agustus 2015	• Dokumentasi Dharma Wanita dalam rangka Pemilihan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pertanian		√
8	Senin, 10 Agustus 2015	• Memilah berita pertanian di media massa	√	
9	Selasa, 11 Agustus 2015	• Memilah berita pertanian di media massa • Membuat Kliping Media • *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Dengan Asuransi Melindungi dan	√ √	√

		Meningkatkan Kesejahteraan Petani”		
10	Rabu, 12 Agustus 2015	• Me-*resume* berita pertanian sesuai dengan media massa tersebut • Menulis pemberitaan di Facebook mengenai kegiatan *Focus Group Discussion* tersebut. • Menerima tamu di Ditjen PSP dalam pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	√	√ √
11	Kamis, 13 Agustus 2015	• Membuat analisis berita bulan Juli 2015 • Rekapitulasi berita pertanian terhadap citra positif dan negatif	√ √	
12	Jumat, 14 Agustus 2015	• Dokumentasi Kegiatan Arisan Bulanan Dharma		√

		Wanita Persatuan Ditjen PSP di Ruang Rapat Ditjen PSP Gedung D Lantai 8 • Mencari berita pertanian di media massa dan media *online*	 √	
13	Selasa, 18 Agustus 2015	• Rapat Persiapan Gelar Pangan Nusantara (GPN) di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Gedung E Lantai 3 • Membuat laporan hasil rapat • Rekapitulasi berita di media massa dan media *online*	 √	√ √
14	Rabu, 19 Agustus 2015	• Membuat analisis berita bulan Agustus 2015 • Memilah berita pertanian di media massa dan media *online*	√ √	

15	Kamis, 20 Agustus 2015	Memilah berita pertanian di media massa dan media *online*	√	
16	Jumat, 21 Agustus 2015	Menyortir berita sesuai subjek dan sesuai tanggal terbit	√	
17	Senin, 24 Agustus 2015	• Menyortir berita bulan Juni 2015 • Rekapitulasi berita pertanian terhadap citra positif dan negatif	√ √	
18	Selasa, 25 Agustus 2015	• Menerima tamu di Ditjen PSP dalam pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) • Me-*resume* berita Ditjen PSP dari media massa dan media *online*	√	√
19	Rabu, 26 Agustus 2015	• Dokumentasi Rapat Upaya Khusus (UPSUS)		√

		Peningkatan Industri Perberasan • Melakukan wawancara langsung kepada petani untuk pembuatan berita di media sosial Ditjen PSP		√
20	Kamis, 27 Agustus 2015	• Mengikuti kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-35 Tahun 2015 yang diadakan di Jakabaring *Sport City*, Palembang		√
21	Jumat, 28 Agustus 2015	• Mengikuti kegiatan Rapat Lanjutan Gelar Pangan Nusantara (GPN) di Badan Ketahanan Pangan (BKP), Gedung E Lantai 3 • Membuat laporan hasil Rapat Gelar Pangan Nusantara		√ √

22	Senin, 31 September 2015	• Memilah berita pertanian di media massa dan media *online* • Me-*resume* berita pertanian	√ √	
23	Selasa, 01 September 2015	• Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) ke-9 di Gedung PIA Lantai *Basement*		√
24	Rabu, 02 September 2015	• Membuat berita Rapat Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Industri Perberasan di Facebook untuk Ditjen PSP		√
25	Kamis, 03 September 2015	• Memilah dan meresume berita pertanian di media massa dan media *online*	√	

Sumber: Arsip Penulis

2.2 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Selama pelaksanaan praktek kerja lapangan, pada kesempatan tersebut penulis melakukan berbagai kegiatan yang dibagi menjadi kegiatan rutin dan insidental antara lain :

2.2.1 Kegiatan Rutin

2.2.1.1 Kliping

Kliping merupakan kegiatan yang penting untuk menyediakan dokumentasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan kliping di bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI merupakan hal yang rutin dilakukan, mengingat bagian Hukum dan Humas Ditjen PSP perlu menyediakan dokumentasi apabila ada yang membutuhkan ataupun ingin mengetahui kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kegiatan kliping juga bertujuan sebagai arsip dokumentasi Ditjen PSP.

Pada saat Praktek Kerja Lapangan, kegiatan kliping merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan mencari beberapa penggalan berita yang muncul di surat kabar, tabloid, majalah, dan juga media *online*, memilah berita positif yang ada di media, dan membuat analisis berita yang masuk per bulannya. Potongan dari surat kabar ditempel dalam sebuah buku besar

khusus untuk kliping dan dokumentasi kegiatan Ditjen PSP Kementerian Pertanian.

2.2.2 Kegiatan Insidental

2.2.2.1 Kunjungan Pers Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kunjungan Pers merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab atau pelaksana humas di setiap Eselon I lingkup Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Biro Umum dan Humas. Tujuannya adalah sebagai forum berbagi (*sharing*) informasi diantara pejabat kehumasan serta ajang untuk menginformasikan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan kepada Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, instansi terkait lainnya dan masyarakat, sehingga tercapai sinergi dan koordinasi yang baik antar petugas atau pelaksana kehumasan yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian.

Kunjungan Pers Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian juga mengundang rekan-rekan jurnalis yang berasal dari berbagai media, baik dari media cetak, maupun media elektronik. Penyelenggaraan Kunjungan Pers di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengusung tema, **"Modernisasi Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan"** dilaksanakan pada tanggal 03-05 Agustus 2015 di *Gajah Mada University Club*, Kampus UGM, Yogyakarta.

Tidak hanya Kunjungan Pers saja, penulis juga mendapatkan suatu kesempatan yang sangat berharga dengan mengunjungi langsung lokasi pertanian di beberapa desa, seperti:

- Lokasi Percontohan Pertanian Modern Unit Pelaksana Kerja (UPJA) Bagyo Mulyo, di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kab. Sukoharjo;
- Lokasi Jaringan Irigasi Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kab. Sukoharjo dan;
- Lokasi kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Dusun Wonorejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kab. Sleman.

2.2.2.2 Membuat dan Cetak Sertifikat

Sebagai apresiasi dan juga tanda bahwa peserta telah mengikuti kegiatan, maka bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI membuat sertifikat yang nantinya akan diserahkan kepada para peserta. Penulis berkesempatan untuk membuat dan mencetak sertifikat yang menjadi tanda bahwa peserta telah mengikuti Kegiatan Kunjungan Pers Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tema, **"Modernisasi Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan"**, yang diadakan dari tanggal 03 hingga 05 Agustus 2015, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.2.3 Menjadi *Info Guide* pada pameran Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya di JCC Hall B, Jakarta

Pameran **Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB)** merupakan program kegiatan tahunan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI bersama dengan *Corporate Forum for Community Development* (CFCD). Tema kegiatan yang diangkat yaitu bernama, **"Gerakan Desa Untuk Masyarakat Yang Lebih Berdaya, Berkarakter, dan Berbudaya Menuju Indonesia Hebat".** Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI kembali mengundang Kementerian Pertanian untuk dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran mereka.

Terdapat rangkaian acara yang diselenggarakan pada GPMB 2015, seperti pameran, seminar, *talkshow*, donor darah, festival jamu gendong dan festival kuliner nusantara. Tahun ini, Kementerian Pertanian RI yang diwakili oleh Biro Umum dan Humas, kembali ikut serta dalam pameran tersebut. Ditjen PSP selaku bagian dari Eselon I juga turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut, contohnya adalah dengan mengirimkan beberapa pegawai dari bagian Hukum dan Humas.

Penulis juga ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menjadi petugas pameran (*info guide*), yang mana bertugas untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas berbagai hal mengenai Kementerian Pertanian RI, dan juga tentunya Ditjen PSP. Penulis juga memberikan leaflet tentang informasi mengenai Ditjen PSP kepada pengunjung yang datang, dan juga lembar kuesioner yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pameran di kemudian hari.

2.2.2.4 Dokumentasi Dharma Wanita dalam rangka pemilihan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pertanian RI

Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional luar biasa Dharma Wanita pada tanggal 7 Desember 1999, merupakan organisasi yang mandiri, tidak terikat pada partai politik manapun dan demokratis. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Pada hari Jumat, 07 Agustus 2015, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian khususnya pada Sub Bagian Hukum dan Humas, memiliki kesempatan untuk mendokumentasikan kegiatan pemilihan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian RI. Penulis

bersama dengan salah seorang pegawai bagian Hukum dan Humas, mendokumentasikan jalannya acara dari mulai hingga selesai pemilihan Ketua Umum. Dokumentasi foto akan menjadi arsip Kementerian Pertanian dan juga Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian RI.

2.2.2.5 Menerima tamu di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelayanan publik PPID

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian.

Pejabat Penerima Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan sebuah wadah kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat tentang pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida serta dukungan alat dan mesin pertanian kepada masyarakat.

Pada hari selasa, 25 Agustus 2015, penulis berkesempatan untuk menerima tamu di Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelayanan publik PPID. Penulis diajarkan bagaimana kerja seorang humas dalam menerima tamu yang datang ke

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendapatkan pelayanan informasi, seperti mengisi lembar daftar tamu PPID, meminta data identitas tamu, lalu memberi pelayanan yang cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat. Tamu yang datang bermacam-macam, ada yang dari instansi pemerintahan juga dan ada pula yang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akan tetapi paling banyak adalah tamu dari LSM.

2.2.2.6 Dokumentasi Rapat Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Industri Perberasan

Untuk pertama kalinya di lingkup Kementerian Pertanian RI, para petani dan semua yang terkait di dalam dunia pertanian berkumpul di lapangan kantor pusat Kementerian Pertanian RI dalam rangka mengikuti rapat membahas Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Industri Perberasan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Dalam acara rapat UPSUS tersebut, penulis mendokumentasikan segala interaksi yang terjadi, antara Menteri Pertanian langsung dengan para petani. Dokumentasi berupa foto dan juga rekaman suara bapak Menteri, yang nantinya akan dimasukan ke dalam berita online Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Tidak hanya

sang Menteri, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Mulyono dan juga Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) saat itu Budi Waseso, juga turut memberikan pidatonya kepada para petani.

Acara rapat UPSUS tersebut diadakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2015, dihadiri kurang lebih 5.600 peserta dari para Gabungan Kelompok Tani di seluruh Indonesia (Gapoktan), para pelaku usaha penggilingan padi beserta seluruh petani yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia menjalin komitmen untuk menjadi mitra kerja Perum Bulog. 6 provinsi tersebut antara lain terdiri dari Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam isi kegiatan tersebut, diharapkan mereka dapat memasok penyediaan beras bagi Bulog agar dapat tersebar di pasar-pasar strategis di seluruh Indonesia.

Pada acara rapat UPSUS yang dilaksanakan di lapangan Kementerian Pertanian, dihadiri juga oleh Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Budi Waseso yang mewakili Kapolri, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti serta para pejabat Eselon I di Kementerian Pertanian RI.

2.2.2.7 Melakukan Wawancara Langsung dengan Petani dan Membuat Berita untuk *News Release* Media *Online* Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI

Dari perhelatan akbar yang baru pertama kali digelar tersebut, penulis mencoba untuk dapat mendengar aspirasi dan juga masukan langsung dari para Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) tersebut. Wawancara tersebut juga bertujuan untuk dokumentasi yang nantinya akan penulis masukan ke dalam berita online Ditjen PSP Kementerian Pertanian. Hal tersebut menjadi tugas bagian Hukum dan Humas Ditjen PSP sebagai sarana untuk meningkatkan citra yang positif Ditjen PSP dan Kementerian Pertanian pada umumnya kepada masyarakat luas.

Hasan, seorang petani dari Desa Jatake, kabupaten Tangerang, merupakan salah satu petani yang tergabung dalam Gapoktan dari daerah Banten. Beliau sudah 6 tahun bergabung dalam kelompok Gapoktan tersebut. Ia memberi masukan tentang pendapatnya terhadap pemerintah mengenai kerjasama Perum Bulog dengan Gapoktan, ia berharap, dengan kerjasama yang terjalin tersebut akan dapat semakin menguntungkan para petani.

2.2.2.8 Rapat

Rapat Koordinasi bersama Kegiatan Pameran Gelar Pangan Nusantara dan Hari Pangan Sedunia Tahun 2015

Rapat merupakan bagian dari proses dan perencanaan dalam melakukan sebuah kegiatan atau *event*. Rapat termasuk dalam *management* humas, yang didalamnya terdapat pembagian *job description*, menentukan konsep acara, dan koordinasi terhadap masing-masing bagian.

Pada Selasa, 18 Agustus 2015, penulis mengikuti rapat koordinasi bersama dengan para pegawai perwakilan dari Eselon II, dan *Event Organizer* acara keseluruhan. Nama dari rapat agenda kegiatan pameran tersebut yaitu, **"Rapat Persiapan Gelar Pangan Nusantara 2015"** dengan tema, **"Pangan Lokal Sebagai Kekuatan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan".**

Rapat diselenggarakan di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI, Gedung E Lantai 3, dan di informasikan oleh bagian Biro Hukum dan Informasi Publik. Terdapat sekitar 11 orang yang mengikuti rapat agenda kegiatan pameran tahunan tersebut.

Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa rencana kegiatan Gelar Pangan Nusantara (GPN) tersebut akan dilaksanakan pada 15-18

September 2015 di Lapangan Tarandam, Provinsi Sumatera Barat. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi, dimana membahas tentang agenda kegiatan pameran tahunan bagian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sebagai penyelenggara kegiatan. Terkait kegiatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI juga bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Inti dari rapat tersebut antara lain:

- Pembahasan teknis acara, dari awal persiapan *stand*, pelaksanaan, hingga pembongkaran *stand.*
- Penghitungan kemungkinan partisipasi dari tiap eselon di tempat kegiatan pameran.
- Pengenalan mitra pelaksana desain *stand* (*Event Organizer Booth Stand*), kepada para peserta rapat.
- Sebagai sarana koordinasi antara Eselon II dan III terhadap kegiatan pameran tersebut.

Pada tanggal 27 Agustus 2015, penulis kembali mengikuti rapat koordinasi bersama dengan para pegawai perwakilan dari Eselon II, *Event Organizer* (EO) *Booth*, dan *Event Organizer* acara keseluruhan. Nama dari rapat agenda kegiatan pameran tersebut yaitu, **“Rapat Hari**

Pangan Sedunia ke-35 Tahun 2015" dengan mengusung tema, **"Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan".** Rapat diselenggarakan di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Lantai *Basement,* dan di informasikan oleh bagian Biro Hukum dan Informasi Publik. Terdapat sekitar 12 orang yang mengikuti rapat agenda kegiatan pameran tahunan tersebut.

Kegiatan pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-35 Tahun 2015 tersebut akan dilaksanakan pada 17-20 Oktober 2015 di Jakabaring *Sport City*, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Hari Pangan Sedunia sendiri merupakan sebuah kegiatan, yang dimulai sejak *Food and Agriculture Organization* (FAO) menetapkan *World Food Day* melalui Resolusi PBB di Roma, Italia, dimana dipilih tanggal 16 Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara Nasional pada setiap tahun.

Penyelenggaraan HPS di Indonesia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para *stakeholder* terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Rapat tersebut juga merupakan rapat koordinasi, yang mana juga membahas tentang

agenda kegiatan pameran tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI sebagai penyelenggara kegiatan. Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah tempat pelaksanaan kegiatan.

Adapun inti pembahasan dalam rapat tersebut antara lain:

- Pembahasan teknis acara, dari awal persiapan *stand*, pelaksanaan, hingga pembongkaran *stand.*
- Penghitungan kemungkinan partisipasi dari tiap eselon di tempat kegiatan pameran.
- Voting pemilihan mitra pelaksana desain *stand* (*Event Organizer Booth Stand*).
- Pembahasan mengenai biaya *stand* kepada mitra pelaksana desain *stand* (*Event Organizer Booth Stand*).
- Sebagai sarana koordinasi antara Eselon II dan III terhadap kegiatan pameran tersebut.

Pada hari Selasa, 01 September 2015 merupakan kali terakhir penulis mengikuti kegiatan rapat di lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. Penulis mengikuti rapat koordinasi bersama dengan para pegawai perwakilan dari Eselon II dan *Event*

Organizer Booth. Rapat tersebut digelar dengan nama **"Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) ke-9"**. PPKI 2015 rencananya akan diselenggarakan pada 28 Oktober-01 November 2015 yang bertempat di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

PPKI merupakan event tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif, dimana Kementerian Pertanian di undang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa poin, antara lain:

- Kementerian Pertanian sebagai instansi pemerintah lainnya ditantang untuk membuat suatu konsep yang memiliki nilai kreatif
- Pembahasan teknis acara, dari awal persiapan *stand*, pelaksanaan, hingga pembongkaran *stand.*
- Penghitungan kemungkinan partisipasi dari tiap eselon di tempat kegiatan pameran.
- Sebagai sarana koordinasi antara Eselon II dan III terhadap kegiatan pameran tersebut.

2.2.2.9 Pertemuan Koordinasi Mengenai Asuransi Pertanian melalui *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Sesuai namanya, pengertian *Focus Group Discussion* mengandung tiga kata kunci: Diskusi (bukan wawancara atau obrolan), Kelompok (bukan individual), dan Terfokus/Terarah (bukan bebas). Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe.

Penulis berkesempatan mengikuti kegiatan tahunan Kementerian Pertanian RI yang berjudul **"Pertemuan Koordinasi Mengenai Asuransi Pertanian melalui *Focus Group Discussion* (FGD)"** dengan tema, **"Dengan Asuransi Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani"** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 dengan narasumber Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang memaparkan hasil Rapat Kerja (Raker) yang telah dilaksanakan pada 8 Juni 2015, memutuskan bahwa anggaran untuk proyek percontohan asuransi pertanian tahun 2015 sebesar Rp. 150.000.000.000,-.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dari pihak asuransi yaitu Sahata L. Tobing selaku Direktur Operasi Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), beliau menjelaskan mengenai tahapan yang diperlukan untuk menjalankan Asuransi Pertanian yaitu Kesiapan Asuransi Jasindo. FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen PSP tersebut dihadiri oleh 16 Provinsi Dinas Pertanian di Indonesia, Kelompok Kerja (Pokja), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Biro Hukum, Asuransi Jasindo, Perwakilan Asosiasi Petani, Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP), Kementerian Perekonomian, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Balitbangtan, LKPP, Agrofarm serta Ditjen PSP.

2.3 Deskripsi Hubungan Masyarakat (Humas)

2.3.1 Definisi Hubungan Masyarakat (Humas)

Definisi Hubungan Masyarakat atau PR menurut Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relations* adalah:

> "PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian". (Jeffkins, 2003:10).

Sedangkan pengertian Hubungan Masyarakat menurut Onong Uchana Effendy "Humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi

dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama", (Rachmat Kriyantono, 2008:3).

Humas menyangkut kepentingan setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial maupun yang non-komersial. Sebenarnya, Humas terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin kontak dengannya. Setiap orang pada dasarnya juga selalu mengalami "Hubungan Masyarakat", kecuali jika ia terisolasi dan tidak menjalin kontak dengan manusia lainnya.

Menurut definisi *Institute of Public Relations* (*IPR*), Humas (*Public Relations*) adalah :

> "Keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya."(Jeffkins, 2003:9)

2.3.2 Ruang Lingkup Humas

Humas memiliki suatu lingkup yang luas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan kegiatan organisasi, baik dalam publik internal maupun eksternal. Oleh karena itu Humas harus memiliki perencanaan terlebih dahulu, kemudian adanya program yang terstruktur.

Humas memiliki bidang-bidang cakupan atau ruang lingkup sebagai berikut :

1. Hubungan dengan pelanggan *(Customer Relations).*
2. Hubungan dengan masyarakat atau penduduk.
3. Hubungan dengan pers atau media massa *(Press Relations).*
4. Hubungan dengan intansi-instansi pemerintah *(Government Relations).*
5. Hubungan karyawan atau pegawai *(Employee Relations).*
6. Hubungan dengan berbagai pihak terkait *(Stakeholder Relations).*

Ruang lingkup *Public Relations* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan pelanggan *(Customer Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan seperti memberi informasi kepada pelanggan, menjelaskan prosedur, tata cara, waktu, menyampaikan pesan-pesan, laporan berkala (melalui brosur, jurnal, surat dan sebagainya), menyelenggarakan acara bersama pelanggan dan menciptakan suasana kenyamanan atau kemudahan bagi urusan para pelanggan dan melayani pelanggan atau tamu.

2. Hubungan dengan masyarakat atau penduduk *(Community Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan membina hubungan baik dengan penduduk atau masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi

penduduk di sekitar lokasi pabrik atau perusahaan atau toko atau di sekitar kantor organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

3. Hubungan dengan Pers atau media massa *(Press Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan membuat kliping (guntingan berita dari surat kabar, majalah, dan lain-lain) serta menganalisa pendapat umum (opini publik) atau aspirasi kelompok-kelompok tertentu *(specific group opinion)*, menyampaikan informasi dan pernyataan resmi melalui media massa, menyelenggarakan acara jumpa pers *(press conference)* atau menyusun dan mengedarkan keterangan pers *(press release)*, membina hubungan komunikasi dua arah dengan wartawan dan redaksi media massa (surat kabar, TV, radio, majalah, tabloid dan lain-lain).

4. Hubungan dengan instansi Pemerintah *(Government Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi pemerintah (pemerintah daerah atau kabupaten atau kota, pihak kepolisian, dinas tenaga kerja dinas perindustrian, dinas pariwisata dan lembaga lainnya), upaya-upaya perolehan informasi aktual dari berbagai instansi pemerintah dan sebaliknya menyampaikan informasi kepada instansi terkait.

5. Hubungan dengan karyawan atau pegawai *(Employee Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan pembinaan hubungan ke dalam (pimpinan dengan karyawan dan sesama bawahan) yang memang terkesan tumpang tindih dengan fungsi dan tugas Bagian Kepegawaian (Personalia). Ada pula yang secara spesifik sebenarnya merupakan ruang lingkup Kehumasan, yaitu menyampaikan kebijakan organisasi atau perusahaan kepada karyawan untuk disampaikan kepada pimpinan. Dengan demikian, diharapkan tercipta suasana harmonis atau selaras dalam kegiatan organisasi atau perusahaan.

6. Hubungan dengan berbagai pihak terkait *(Stakeholder Relations)*

   Hal ini mencakup kegiatan yang menunjang atau terus-menerus berhubungan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan atau lembaga (seperti agen-agen, supplier, distributor) dan juga mencakup hubungan dengan para pemegang saham *(Stakeholder Relations)*. (Rudy, 2005 : 85-88).

2.3.3 Tujuan Humas

Karena Humas merupakan fungsi manajemen dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan Humas adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan Humas, antara lain :

1. Menciptakan Pemahaman (*Mutual Understanding*) antara perusahaan dan publiknya.

   Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (*well-informed*) antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam kegiatan komunikasi (*primery-breakdown of communication*).

2. Membangun Citra Korporat (*Corporate Image*)

   Citra (*image*) merupakan gambaran yang ada dalam benak publik tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tentang perusahaan menyangkut pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan atau perilaku individu-individu dalam perusahaan dan lainnya. Pada akhirnya persepsi akan mempengaruhi sikap publik, apakah mendukung, netral, atau memusuhi.

3. Citra Korporat Melalui Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

   Corporate Social Responsibility adalah program *Public Relations* untuk melibatkan diri mengatasi persoalan-persoalan sosial di lingkungannya.

Dengan kata lain, CSR adalah pengintegrasian kepedulian perusahaan. Ada yang menyebut sebagai *Community Development, yaitu* investasi sosial perusahaan yang bersifat jangka panjang. Secara berangsur akan terbentuk citra positif terhadap kegiatan sosial yang dilakukan. Beberapa kegiatan bisa menjadi *trademark* perusahaan yang berpengaruh dalam memperkuat merek produk.

4. Membentuk Opini Publik yang *Favorable*

   Sikap publik terhadap perusahaan bila diekspresikan disebut opini publik. Jadi, opini publik ini merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikapnya terhadap perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan membuat keuntungan kompetetif bagi perusahaan.

5. Membentuk *Good Will* dan Kerjasama

   Good will dan kerja sama dapat terwujud karena inisiatif yang dilakukan berulang-ulang oleh *Public Relations* perusahaan untuk menanamkan saling pengertian dan kepercayaan kepada publiknya.

2.3.4 Fungsi dan Peranan Humas

a. Fungsi Humas

Adapun fungsi humas menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya *Public Relations*: *Principles and Problems*, mengemukakan fungsi humas sebagai berikut:

1. *It should serve the public's interest* (mengabdi kepada kepentingan umum)
2. *Maintain good communication* (Memelihara komunikasi yang baik)
3. *Stress good morals and manners* (menitikberatkan moral dan perilaku yang baik)

Dari fungsi humas di atas menurut Bertrand R. Canfield dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik ekstern maupun intern.
3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.

b. Peranan Humas

Peran utama Humas pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai *Communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2. Membina *Relationship*, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
3. Peranan *Back Up* management yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk *Corporate Image.* Artinya peranan *Public relations* berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. (Effendy, 2008 : 9-11)

2.4 Analisa Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Pada dasarnya, kegiatan Humas adalah kegiatan dalam rangka menciptakan pemahaman bersama, baik dengan publik internal maupun eksternal. Kegiatan Humas erat kaitannya dengan hubungan dan relasi antar bagian atau divisi bahkan dengan elemen masyarakat diluar perusahaan.

Definisi Humas menurut Onong Uchana Effendy, “Humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama” (Rachmat Kriyantono, 2008:3).

Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Humas di bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian belum termasuk Humas yang *state of being* atau melembaga, dikarenakan Kementerian Pertanian RI sendiri memang sudah memiliki bagian Humas yang memang khusus menangani berbagai persoalan kehumasan, yaitu di Biro Umum dan Humas, sedangkan Sub Bagian Hukum dan Humas tidak hanya menangani persoalan kehumasan saja, tetapi juga membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian juga merupakan jembatan dalam mengakses informasi secara transparan melalui pelayanan publik PPID, yang mana si pemohon dapat datang secara langsung ke kantor ataupun berinteraksi secara *online*.

Selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Bagian Umum Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatan kehumasan berlangsung dengan cukup baik. Koordinasi antar anggota, antara Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan jajaran pegawai berlangsung dengan harmonis.

Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Bagian Umum Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, penulis melakukan kegiatan rutin diataranya kliping dan rapat. Dua kegiatan ini merupakan hal yang termasuk dalam kegiatan kehumasan.

1. Kliping

   Meskipun pada saat ini kliping tidak lagi menjadi pilihan utama dalam menyimpan dokumentasi dikarenakan sudah berkembang pesatnya era digital, namun kliping merupakan hal yang penting dalam menyimpan bukti fisik dari foto-foto dan artikel mengenai perusahaan dan seputar kegiatannya.

   Dalam kegiatan Humas, kliping adalah media humas yang penting untuk mengabadikan hal-hal mengenai perusahaan.

2. Rapat

Rapat merupakan hal yang penting dalam menyatukan berbagai persepsi, ide, tujuan dari masing-masing karyawan atau panitia dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun program kerja. Dalam rapat terdapat proses interaksi antara komunikator dan komunikan yang terjadi secara terus-menerus.

Dalam kehumasan, terdapat proses perencanaan-pelaksanaan-evaluasi, dan rapat termasuk dalam proses perencanaan. Dimana setiap kegiatan yang akan dilakukan perlu adanya rapat untuk sosialisasi program kerja, perencaaan kegiatan, konsep acara, pembagian *job description*, target pelaksanaan acara, dll.

Pada rapat yang penulis ikuti di Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, proses interaksi dari peserta rapat terjadi dinamis. Ide, gagasan, kritik dan saran muncul sehingga banyak sekali perubahan ataupun perbaikan menuju kearah yang lebih baik.

2.5 Analisa Pelayanan Perusahaan terhadap Mahasiswa PKL

Pada saat mengajukan surat permohonan Praktek Kerja Lapangan, penulis diterima dengan ramah langsung oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada hari pertama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, penulis disambut pula dengan baik oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas. Dalam melaksanakan kegiatan, tidak ada ketentuan yang mengikat terkait kewajiban mengenakan pakaian, akan tetapi, penulis berinisiatif agar mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, contohnya seperti kemeja dan celana bahan hitam pada hari Senin-Kamis, dan pakaian batik pada hari Jumat.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan berlangsung setiap hari Senin-Jumat dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Setiap harinya, penulis diarahkan dalam melakukan kegiatan oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas dengan ramah dan jelas, sehingga cukup banyak ilmu yang didapat selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis diberi banyak kesempatan mengikuti agenda kegiatan penting Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, seperti: Kunjungan Pers, menjadi Petugas Pameran (*Info Guide*) pada pameran Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya, mendokumentasikan kegiatan Dharma Wanita, menerima tamu di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelayanan publik PPID, melakukan wawancara langsung dengan petani dan dokumentasi rapat Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Industri Perberasan.

Dalam melaksanakan *job desk*, penulis banyak diberi arahan oleh Kepala Bagian Sub Bagian Hukum dan Humas sehingga penulis tidak kebingungan dalam melaksanakan kerja praktek.

Dalam melaksanakan kegiatan, penulis dapat mengimplementasikan teori-teori yang didapat pada saat kuliah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan memberi penulis wawasan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kehumasan di sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki reputasi baik.